

LAPORAN KINERJA TAHUN 2025

BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN MALUKU



**BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN MALUKU
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
2025**

LAPORAN KINERJA TAHUN 2025

BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN MALUKU



**BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN MALUKU
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
2025**

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Laporan Kinerja Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Maluku Tahun 2025 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Penyusunan laporan kinerja ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, serta penerapan penganggaran berbasis kinerja atas pelaksanaan kegiatan selama Tahun Anggaran 2025. Laporan ini disusun sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi kinerja dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and clean government*), sekaligus sebagai bahan umpan balik bagi penyusunan perencanaan pada periode selanjutnya.

Laporan kinerja tahun 2025 disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan Laporan Kinerja ini merupakan bagian dari pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang memuat informasi mengenai perencanaan, pelaksanaan, serta pencapaian kinerja Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Maluku selama 1 (satu) tahun anggaran 2025 sesuai dengan tugas dan fungsi BRMP Maluku yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian. Laporan ini juga menyajikan analisis terhadap capaian kinerja, permasalahan yang dihadapi, serta langkah-langkah perbaikan yang dilakukan sebagai upaya peningkatan kinerja organisasi di masa yang akan datang.

Akhir kata, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam penyusunan laporan kinerja ini. Diharapkan laporan ini dapat memberikan manfaat dan digunakan sebagaimana mestinya.

Ambon, 15 Januari 2026

Kepala Balai,



D. Gunawan, S.TP., M.Si
NIP. 197612162005011002

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Maluku Tahun Anggaran 2025 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, fungsi, dan penggunaan anggaran dalam rangka mendukung pembangunan pertanian di Provinsi Maluku. Laporan ini merupakan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan disusun mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 serta kebijakan organisasi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian.

Pada Tahun 2025, BRMP Maluku melaksanakan peran strategis dalam penerapan hasil perakitan dan perekayasa teknologi pertanian spesifik lokasi, modernisasi pertanian, pendampingan program strategis Kementerian Pertanian, serta penguatan tata kelola kelembagaan. Pelaksanaan kegiatan difokuskan pada dua program utama Kementerian Pertanian, yaitu Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri serta Program Dukungan Manajemen, yang dijabarkan ke dalam berbagai kegiatan teknis dan manajerial.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025, BRMP Maluku menetapkan empat sasaran program, yaitu: (1) meningkatnya pelaku usaha tani yang menerapkan standar pertanian, (2) tersedianya teknologi hasil perekayasa dan perakitan yang adaptif, (3) terwujudnya birokrasi yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima, serta (4) terkelolanya anggaran yang akuntabel dan berkualitas. Hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa secara umum kinerja BRMP Maluku Tahun 2025 berada pada kategori sangat berhasil, dengan nilai rata-rata capaian kinerja sebesar 107,87 persen.

Capaian penting pada tahun 2025 antara lain keberhasilan pendampingan penerapan standar instrumen pertanian pada satu lembaga petani di Kabupaten Seram Bagian Barat, yang mendukung penerapan SNI IndoGAP Tanaman Pangan dan standar mutu beras. Selain itu, kinerja reformasi birokrasi menunjukkan hasil yang sangat baik, ditandai dengan capaian nilai Pembangunan Zona Integritas sebesar 86,10 [dari target 84,74] dan memenuhi kriteria menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK/WBBM). Di bidang pengelolaan anggaran, nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) mencapai 95,09 dari target 93,33, yang mencerminkan pengelolaan anggaran yang efektif, efisien, dan akuntabel.

Secara keseluruhan, kinerja BRMP Maluku Tahun 2025 menunjukkan komitmen yang kuat dalam mendukung modernisasi pertanian, peningkatan tata kelola birokrasi, serta akuntabilitas pengelolaan anggaran. Laporan kinerja ini diharapkan dapat menjadi dasar evaluasi, perbaikan berkelanjutan, serta penguatan perencanaan dan pelaksanaan program pada periode selanjutnya guna mendukung pembangunan pertanian yang maju, berdaya saing, dan berkelanjutan di Provinsi Maluku.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vii
I. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	1
1.2. Kondisi Geografis Maluku	3
1.3. Kondisi Demografi Organisasi	4
II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	7
2.1. Visi.....	7
2.2. Misi	7
2.3. Tujuan.....	7
2.4. Sasaran Program.....	8
2.5. Program dan Kegiatan	8
2.6. Perjanjian Kinerja Tahun 2025	9
III. AKUNTABILITAS KINERJA.....	12
3.1. Pengukuran Kinerja	12
3.2. Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Kinerja	15
3.3. Realisasi Keuangan.....	25
IV. PENUTUP	26
LAMPIRAN.....	27

DAFTAR TABEL

TABEL 1. KEGIATAN BRMP MALUKU TAHUN 2025	8
TABEL 2. PERJANJIAN KINERJA BRMP MALUKU TAHUN 2025	10
TABEL 3. CAPAIAN KINERJA BRMP MALUKU TAHUN 2025	13
TABEL 4. CAPAIAN KINERJA SASARAN MENINGKATNYA PENGELOLAAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN	16
TABEL 6. KOMPONEN PENGUNGKIT.....	18
TABEL 7. KOMPONEN HASIL.....	19
TABEL 8. PERSYARATAN PENETAPAN UNIT KERJA/SATUAN KERJA MENUJU WBK/WBBM.....	19
TABEL 9. CAPAIAN KINERJA SASARAN TERWUJUDNYA BIROKRASI BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN YANG EFEKTIF DAN EFISIEN, DAN BERORIENTASI PADA LAYANAN PRIMA.....	20
TABEL 10. HASIL PENILAIAN LEMBAR KERJA EVALUASI ZONA INTEGRITAS	21
TABEL 11. CAPAIAN KINERJA SASARAN TERKELOLANYA ANGGARAN BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN YANG AKUNTABEL DAN BERKUALITAS	24

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1. STRUKTUR ORGANISASI BRMP	2
GAMBAR 2. JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN JABATAN DI BRMP MALUKU TAHUN 2025	5
GAMBAR 3. JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN DI BRMP MALUKU TAHUN 2025	5
GAMBAR 4. RAPAT PERENCANAAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2025	14
GAMBAR 5. PENANDATANGANAN KOMITMEN BERSAMA TAHUN 2025	14
GAMBAR 6. RAPAT EVALUASI AKHIR KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2025	15
GAMBAR 7. PERBANDINGAN NILAI INDIKATOR KINERJA BALAI TAHUN 2021 - 2025	15
GAMBAR 8. NILAI IKPA TAHUN 2025	23

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1. STRUKTUR ORGANISASI BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN (BRMP) MALUKU TAHUN 2025	27
LAMPIRAN 2. DATA KEPEGAWAIAN BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN (BRMP) MALUKU TAHUN 2025.....	28
LAMPIRAN 3. PERJANJIAN KINERJA BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN (BRMP) MALUKU TAHUN 2025.....	29
LAMPIRAN 4. REALISASI ANGGARAN BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN (BRMP) MALUKU TAHUN ANGGARAN 2025	38
LAMPIRAN 5. MANUAL IKU BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN (BRMP) MALUKU TAHUN ANGGARAN 2025.....	39
LAMPIRAN 6. RENCANA AKSI BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN (BRMP) MALUKU TAHUN 2025.....	44
LAMPIRAN 7. DOKUMENTASI KEGIATAN BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN (BRMP) MALUKU TAHUN 2025.....	45

I. PENDAHULUAN

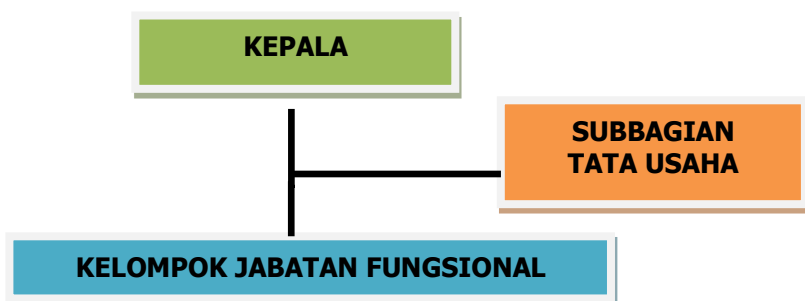
1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Laporan kinerja merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang diembankan kepada setiap instansi pemerintah dalam pemanfaatan anggaran. Unsur utama dalam penyusunan laporan kinerja meliputi pengukuran dan evaluasi kinerja, serta penyajian hasil analisis atas capaian kinerja yang diungkapkan secara memadai dan transparan. Pada prinsipnya, laporan kinerja disusun oleh setiap unit organisasi pada seluruh jenjang yang telah menetapkan dan melaksanakan perjanjian kinerja. Sebagai bagian dari instansi pemerintah, Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Maluku memiliki kewajiban untuk menyusun dan menyampaikan laporan kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran dan kinerja organisasi. Penyusunan laporan kinerja tersebut juga merupakan implementasi dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun tujuan penyusunan laporan kinerja BRMP Maluku adalah untuk menyajikan informasi kinerja yang terukur dan akuntabel kepada pemberi mandat terkait capaian kinerja yang telah dan seharusnya diraih oleh BRMP Maluku, serta sebagai sarana evaluasi dan perbaikan berkelanjutan dalam rangka peningkatan kinerja organisasi di masa yang akan datang.

Terbentuknya BRMP Maluku diawali dengan perubahan Badan Standardisasi Instrumen Pertanian menjadi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 192 Tahun 2024 tanggal 8 November 2024, yang merupakan transformasi strategis untuk memperkuat peran kelembagaan dalam percepatan penerapan teknologi pertanian modern. Perubahan ini menandai pergeseran fokus dari standardisasi instrumen menuju pendampingan dan implementasi teknologi di tingkat pengguna. Melalui transformasi tersebut, balai diharapkan mampu meningkatkan efektivitas modernisasi pertanian guna mendukung peningkatan produktivitas, daya saing, dan kesejahteraan pelaku usaha pertanian. Perubahan nomenklatur ini didukung dengan terbitnya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian. Pada Peraturan Presiden tersebut di bab III Organisasi, bagian kesatu Susunan Organisasi, pasal 7 Kementerian Pertanian telah lahir 1 (satu) badan baru dalam susunan organisasi Kementerian Pertanian, yaitu Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian. Pada bagian kesepuluh, pasal 33 disebutkan bahwa Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian mempunyai tugas menyelenggarakan perakitan dan modernisasi pertanian. Terbitnya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian kemudian diikuti terbitnya Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian pada bab

III, pasal 137 dijelaskan bahwa Balai Penerapan Modernisasi Pertanian yang selanjutnya disebut BRMP adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP) yang melaksanakan hasil perakitan dan perekayasaan paket teknologi spesifik lokasi, serta modernisasi pertanian. Tugas BRMP disebutkan pada pasal 138, yaitu melaksanakan hasil perakitan dan perekayasaan paket teknologi spesifik lokasi, serta modernisasi pertanian. Pada pasal 139 dijelaskan bahwa dalam melaksanakan tugas, BRMP menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: a) pelaksanaan rencana kegiatan dan anggaran di bidang penerapan hasil perakitan dan perekayasaan paket teknologi spesifik lokasi, serta modernisasi pertanian; b) pelaksanaan pengujian, diseminasi, dan penerapan paket teknologi spesifik lokasi, serta model pertanian modern; c) pelaksanaan produksi benih/bibit sumber, dan penilaian kesesuaian; d) pelaksanaan pendampingan program pembangunan pertanian; e) pelaksanaan identifikasi kebutuhan teknologi spesifik lokasi dan Standar Nasional Indonesia; f) pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penerapan hasil perakitan dan perekayasaan paket teknologi spesifik lokasi, serta modernisasi pertanian; g) pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penerapan hasil perakitan dan perekayasaan paket teknologi spesifik lokasi, serta modernisasi pertanian; h) pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai Penerapan Modernisasi Pertanian

Pada pasal 140, disebutkan bahwa BRMP terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha, dan b. Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana. Struktur organisasi BRMP berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Balai Penerapan dan Modernisasi Pertanian dalam Lampiran I digambarkan sesuai gambar 1.



Gambar 1. Struktur organisasi BRMP

Target kinerja yang harus dicapai oleh BRMP Maluku merupakan penjabaran dari Perjanjian Kinerja yang disepakati antara Kepala BRMP Maluku dan Kepala BRMP pada awal tahun berjalan. Dengan demikian, pelaporan dan pertanggungjawaban kinerja kepada atasan menjadi kewajiban yang melekat pada setiap instansi pemerintah sebagai wujud komitmen terhadap prinsip akuntabilitas kinerja. Penyampaian pertanggungjawaban kinerja tersebut tidak

hanya bertujuan untuk mengidentifikasi aspek-aspek yang masih perlu ditingkatkan, tetapi juga untuk menunjukkan tingkat efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas Kepala BRMP Maluku dalam mencapai target kinerja yang telah diperjanjikan. Selain itu, laporan kinerja menyajikan informasi mengenai gambaran singkat organisasi, rencana dan sasaran kinerja, pengukuran kinerja, serta evaluasi atas pelaksanaan program dan kegiatan, termasuk kondisi aktual yang diharapkan dapat terwujud sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

1.2. Kondisi Geografis Maluku

Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Maluku berkedudukan di ibu kota Provinsi Maluku, yaitu Kota Ambon dan memiliki wilayah kerja yang mencakup seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Maluku. Secara astronomis, wilayah Provinsi Maluku berada antara 20° 30'-9° Lintang Selatan dan 124°-136° Bujur Timur. Dari aspek geografis, Provinsi Maluku berbatasan dengan Laut Seram di sebelah utara, Lautan Indonesia dan Laut Arafura di sebelah selatan, Provinsi Papua di sebelah timur, serta Pulau Sulawesi di sebelah barat. Provinsi Maluku terdiri atas 11 kabupaten/kota dengan luas wilayah sebesar 46.150,92 km² yang mencakup 1.422 pulau, di mana sekitar 90 persen wilayahnya merupakan wilayah perairan. Kondisi wilayah kepulauan tersebut berimplikasi langsung terhadap pola pengelolaan sumber daya pertanian serta pelaksanaan kegiatan penerapan dan modernisasi pertanian.

Berdasarkan informasi dari *DPMPTSP Maluku*, karakteristik iklim Provinsi Maluku pada umumnya bersifat tropis dan musiman dengan tingkat keragaman yang cukup tinggi antarwilayah. Hal tersebut terjadi karena Maluku terdiri atas kepulauan dan di sekitarnya terdapat bentang lautan. Keadaan iklim pulau-pulau kecil umumnya bervariasi dan tidak semuanya mempunyai kisaran iklim yang sama. Bagian utara dan tengah wilayah Maluku umumnya beriklim basah dengan curah hujan rata-rata tahunan yang tinggi, berkisar antara 1.381 mm/tahun (untuk daerah Namlea di Pulau Buru) hingga 4.090 mm/tahun (untuk daerah Tehoru di Pulau Seram bagian selatan). Bagian selatan wilayah Maluku umumnya beriklim kering dengan curah hujan rata-rata tahunan yang rendah, berkisar antara 991 mm/tahun (untuk daerah Ilwaki di Pulau Wetar) hingga 2.972 mm (untuk daerah Elat di Pulau Kei Besar). Variasi iklim tersebut memengaruhi pola tanam, kalender tanam, serta pemilihan komoditas pertanian yang dikembangkan. Kondisi agroklimat ini menjadi salah satu pertimbangan utama BRMP Maluku dalam merancang, mengimplementasikan, dan mengevaluasi kegiatan perakitan serta penerapan teknologi pertanian yang adaptif terhadap kondisi spesifik lokasi.

Secara geologis, Kepulauan Maluku berada pada lempeng Australia dan didominasi oleh wilayah perairan dengan potensi sumber daya alam yang melimpah. Kondisi tersebut menjadikan Maluku dikenal sebagai daerah penghasil rempah-rempah sejak masa lampau. Sejarah mencatat bahwa Maluku telah dikenal hingga ke Eropa sejak masa kerajaan sebagai salah satu pusat produksi rempah-rempah dunia. Komoditas unggulan berupa pala dan cengkih menjadikan Maluku sebagai wilayah strategis dalam jalur perdagangan internasional. Jalur

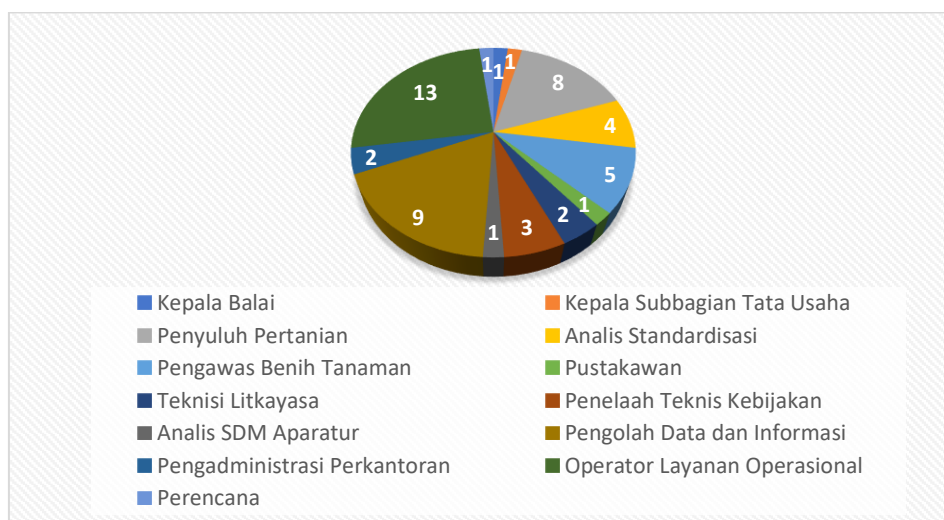
perdagangan dunia yang dikenal sebagai jalur sutra dan jalur rempah-rempah sama-sama melintasi wilayah Maluku, sehingga kawasan ini ramai dikunjungi oleh pedagang dari berbagai wilayah, antara lain Arab, Persia, Gujarat, dan Tiongkok. Hingga saat ini, komoditas perkebunan terutama pala dan cengkih masih menjadi komoditas unggulan dan memiliki peranan penting dalam perekonomian Provinsi Maluku.

1.3. Kondisi Demografi Organisasi

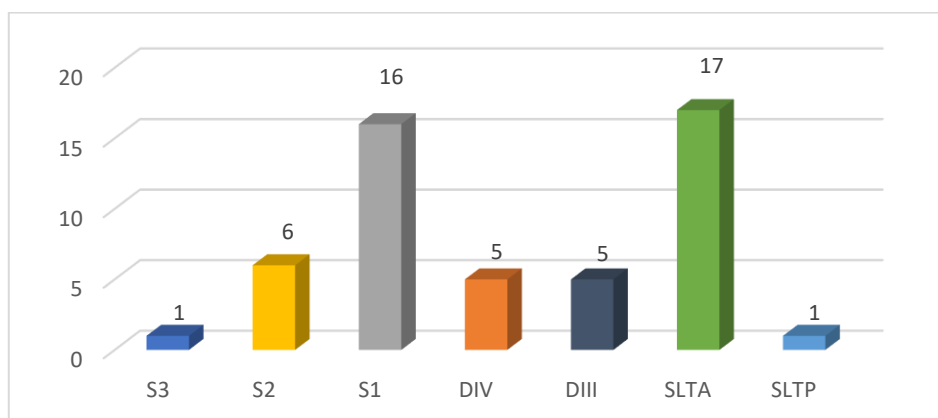
Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Maluku dipimpin oleh seorang Kepala Balai tingkat eselon IIIa. Pada pelaksanaan tugasnya kepala balai dibantu oleh subbagian tata usaha yang dipimpin oleh Kepala Subbagian Tata Usaha, Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari tim kerja program, evaluasi dan pendampingan modernisasi pertanian yang dipimpin oleh Ketua Tim Kerja Program, Evaluasi dan Pendampingan Modernisasi Pertanian dan tim kerja layanan dan penerapan modernisasi pertanian yang dipimpin oleh Ketua Tim Kerja Layanan dan Penerapan Modernisasi Pertanian dan Kelompok Jabatan Pelaksana. Pada Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian, pasal 129 dijelaskan bahwa subbagian tata usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran, evaluasi dan pelaporan, urusan keuangan, urusan sumber daya manusia, tata usaha, rumah tangga, prasarana dan sarana, penatausahaan barang milik/kekayaan negara, persuratan, kearsipan, dan hubungan masyarakat lingkup Balai Perakitan dan Pengujian Agroklimat dan Hidrologi. Pada Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 649/KPTS/OT.050/M/08/2025 tentang Kelompok Substansi dan Tim Kerja Pada Kelompok Jabatan Fungsional Lingkup Kementerian Pertanian dijelaskan bahwa tugas tim kerja program dan evaluasi adalah melakukan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran di bidang penerapan hasil perakitan dan perekayasaan paket teknologi spesifik lokasi, serta modernisasi pertanian; melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penerapan hasil perakitan dan perekayasaan paket teknologi spesifik lokasi, serta modernisasi pertanian; melakukan pendampingan program pembangunan pertanian; melakukan identifikasi kebutuhan teknologi spesifik lokasi dan Standar Nasional Indonesia; dan melakukan pengujian paket teknologi spesifik lokasi. Tugas tim kerja layanan dan penerapan modernisasi pertanian adalah melakukan diseminasi dan penerapan paket teknologi spesifik lokasi, serta model pertanian modern; melakukan produksi benih/bibit sumber, pengelolaan unit pengelola benih/bibit sumber dan kebun instalasi serta penilaian kesesuaian; dan melakukan bimbingan teknis di bidang penerapan hasil perakitan dan perekayasaan paket teknologi spesifik lokasi, serta modernisasi pertanian.

Pelaksanaan tugas dan fungsi yang dijalankan BRMP Maluku perlu didukung oleh sumber daya manusia (SDM) yang merupakan faktor penting dalam mencapai tujuan organisasi. SDM BRMP Maluku berjumlah 51 orang ASN tersedia pada gambar 2, terdiri dari Kepala Balai, Kepala Subbagian Tata Usaha, 8 (delapan) orang penyuluh pertanian, 4 (empat) orang analis standardisasi, 5 (lima)

orang pengawas benih tanaman, 1 (satu) orang pustakawan, 2 (dua) orang teknisi litkayasa, 3 (tiga) orang penelaah teknis kebijakan, 1 (satu) orang analis sumber daya manusia aparatur, 9 (sembilan) orang pengolah data dan informasi, 2 (dua) orang pengadministrasi perkantoran, dan 13 (tiga belas) orang operator layanan operasional, 1 (satu) orang perencana. Latar belakang pendidikan SDM BRMP Maluku tersedia pada gambar 3, terdiri dari 1 (orang) S3, 6 (enam) orang S2, 16 (enam belas) orang S1, 5 (lima) orang DIV, 5 (lima) orang DIII, 17 (tujuh belas) orang SLTA, dan 1 (satu) orang SLTP.



Gambar 2. Jumlah pegawai berdasarkan jabatan di BRMP Maluku tahun 2025



Gambar 3. Jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan di BRMP Maluku tahun 2025

BRMP Maluku selain didukung oleh SDM juga didukung oleh sarana prasarana Instalasi Pengujian dan Penerapan Modernisasi Pertanian (IP2MP) Makariki sebagai sub unit kerja BRMP Maluku yang berlokasi di Desa Makariki,

Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah. Luas lahan IP2MP Makariki 307 hektar dengan agroekosistem lahan kering. Lahan yang produktif luasnya kurang lebih 116 hektar, lahan yang masih potensial untuk diolah kurang lebih 76 hektar, lahan yang tidak potensial karena merupakan kawasan hutan luasnya sekitar 140 hektar, sedangkan lahan yang terdampak abrasi seluas kurang lebih 51 hektar.

IP2MP Makariki mempunyai fungsi yang sangat strategis dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BRMP Maluku dalam melaksanakan kegiatan pengujian, penerapan teknologi dan pendampingan petani. IP2MP Makariki sebagai unit pengelola benih sumber (UPBS) melalui pelaksanaan kegiatan produksi benih varietas unggul sesuai standar berperan menyediakan benih sumber varietas unggul berstandar dalam mendukung keberlanjutan produktivitas komoditas strategis terutama tanaman pangan (padi dan jagung). IP2MP Makariki berperan sangat penting dalam menghasilkan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).

II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Maluku, yang berfungsi sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP), memiliki kewenangan dalam perumusan rencana strategis yang memuat visi, misi, dan kebijakan operasional. Rencana strategis ini selanjutnya dijabarkan ke dalam rencana operasional yang komprehensif sebagai acuan pelaksanaan kegiatan dan program BRMP Maluku untuk mencapai target yang telah ditentukan.

2.1. Visi

Visi Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Maluku “Mewujudkan Lembaga Unggul dalam Perekayasaan dan Perakitan Teknologi Pertanian Terapan Modern yang Inovatif dalam Mendukung Pertanian Maju di Maluku”

2.2. Misi

Misi Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Maluku sebagai berikut:

1. Melaksanakan perekayasaan dan perakitan teknologi pertanian terapan yang inovatif, adaptif, dan aplikatif sesuai kebutuhan pembangunan pertanian nasional;
2. Mengembangkan prototipe/produk/model teknologi pertanian terapan yang mendukung peningkatan produktivitas, efisiensi, dan keberlanjutan usaha tani;
3. Meningkatkan kapasitas SDM dan kelembagaan dalam perekayasaan dan perakitan teknologi pertanian terapan;
4. Memfasilitasi diseminasi dan pemanfaatan hasil perekayasaan teknologi pertanian terapan kepada pelaku utama dan pelaku usaha di sektor pertanian;
5. Membangun kemitraan strategis dan jejaring inovasi dengan lembaga riset, perguruan tinggi, industri, dan pemangku kepentingan lainnya, di dalam maupun luar negeri.

2.3. Tujuan

Sebagai penjabaran dari Visi dan Misi BRMP Maluku, maka tujuan yang ingin dicapai selama tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Mendorong peningkatan kapasitas, kesadaran, dan kepatuhan pelaku usaha tani dalam menerapkan standar pertanian yang baik (*Good Agricultural Practices*) guna meningkatkan produktivitas, mutu hasil pertanian, daya saing, serta keberlanjutan usaha tani.

2. Menyediakan teknologi pertanian hasil perekayasaan dan perakitan yang inovatif, adaptif terhadap kondisi agroekosistem lokal, serta mudah diterapkan untuk mendukung peningkatan efisiensi dan modernisasi pertanian.
3. Mewujudkan tata kelola Reformasi Birokrasi yang profesional, responsif, transparan, dan berorientasi pada pelayanan prima di lingkungan BRMP Maluku.
4. Mewujudkan pengelolaan anggaran BRMP Maluku yang Akuntabel dan Berkualitas.

2.4. Sasaran Program

Berdasarkan tugas dan fungsinya, BRMP Maluku mempunyai 4 (empat) sasaran program, yaitu:

1. Meningkatnya Pelaku Usaha Tani yang Menerapkan Standar Pertanian.
2. Tersedianya Teknologi Hasil Perekayasaan dan Perakitan yang Adaptif.
3. Terwujudnya Birokrasi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima.
4. Terkelolanya Anggaran Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas.

2.5. Program dan Kegiatan

Berdasarkan tugas dan fungsinya, pada tahun 2025 BRMP Maluku mendukung 2 (dua) program Kementerian Pertanian, yaitu: 1) Program nilai tambah dan daya saing industri, dan 2) Program dukungan manajemen. Pelaksanaan program tersebut dijabarkan melalui berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh BRMP Maluku di tahun 2025 pada tabel 1. Pelaksanaan kegiatan teknis dilakukan di beberapa lokasi di Provinsi Maluku, terutama pada lokasi sentra tanaman pangan komoditas padi. Tujuan dari pelaksanaan kegiatan adalah untuk melaksanakan pendampingan swasembada dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi kepada *stakeholder*, baik kepada petani dan pelaku usaha tani lainnya.

Pendampingan swasembada ini bertujuan untuk memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai dengan kebijakan serta memberikan bimbingan teknis serta solusi atas berbagai kendala yang dihadapi di lapangan, sehingga permasalahan dapat segera ditangani. Kemudian, dalam kegiatan diseminasi, diharapkan setiap materi yang disampaikan dapat diadopsi oleh *stakeholder* terkait sebagai upaya mendukung peningkatan produksi, nilai tambah, serta daya saing komoditas pertanian. Di samping itu, pelaksanaan kegiatan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan sektor pertanian di Provinsi Maluku.

Tabel 1. Kegiatan BRMP Maluku tahun 2025

No.	Kegiatan	Target	Lokasi	Penanggung Jawab
1.	Diseminasi Standar Instrumen Pertanian	136 orang	Kabupaten Maluku Tengah	La Dahamarudin, S.P., M.P
2.	Pendampingan Program Strategis Kementerian Pertanian	1 Kegiatan	Provinsi Maluku	Dr. Gunawan., S.TP., M.Si.
3.	Pelaksanaan Pengelolaan BMN	1 layanan	Kabupaten Maluku Tengah (IP2MP Makariki)	La Dahamarudin, S.P., M.P
4.	Pengelolaan Informasi Publik	1 layanan	Kota Ambon	Aksan Loou., SP., M.Si.
5.	Penyusunan Program dan Anggaran	1 Layanan	Kota Ambon	Novendra CN., SP., M.Sc.
6.	Layanan Penerapan SIP dan Pengelolaan Produk Hasil Standardisasi		Kota Ambon	Aksan Loou., SP., M.Si.
7.	Layanan Keuangan		Kota Ambon	M. Yusuf Nurdin, S.T.
8.	Layanan Ketatausahaan, Rumah Tangga, Kearsipan, dan Perlengkapan		Kota Ambon	M. Yusuf Nurdin, S.T.
9.	Sinkronisasi Kegiatan		Kota Ambon	Dr. Gunawan., S.TP., M.Si.
10.	Gaji dan Tunjangan	1 Layanan	Kota Ambon	M. Yusuf Nurdin, S.T.
11.	Operasional dan Pemeliharaan Kantor		Kota Ambon	M. Yusuf Nurdin, S.T.
12.	Layanan Pemantauan dan Dokumentasi	1 Dokumen	Kota Ambon	Novendra CN., SP., M.Sc

2.6. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan instrumen manajemen kinerja yang memuat penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program dan kegiatan tertentu dengan indikator kinerja yang terukur dan jelas. Melalui Perjanjian Kinerja, terbangun komitmen dan kesepakatan antara pemberi dan penerima amanah dalam mewujudkan kinerja yang terukur, sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan, serta dukungan sumber daya yang tersedia.

Target kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja disusun dengan mempertimbangkan capaian hasil (*outcome*) pada periode sebelumnya guna menjamin kesinambungan kinerja dari tahun ke tahun. Perjanjian Kinerja BRMP Maluku Tahun 2025 memuat indikator kinerja beserta target pencapaiannya yang dirumuskan secara spesifik, terukur, dapat dicapai, memiliki batas waktu yang jelas, serta dapat dipantau dan dievaluasi sebagai dasar penilaian kinerja instansi.

Sebagai instansi pemerintah yang berinteraksi langsung dengan pengguna dan para pemangku kepentingan di berbagai tingkatan, khususnya di wilayah daerah, BRMP Maluku dituntut untuk menunjukkan peran yang nyata melalui kejelasan jenis kegiatan, mekanisme pelaksanaan, serta lokasi pelaksanaannya, termasuk kegiatan pendampingan swasembada pangan dan kegiatan diseminasi

standar instrumen pertanian yang dilaksanakan oleh BRMP Maluku. Sejalan dengan hal tersebut, sesuai dengan anggaran yang telah dialokasikan dalam Rencana Kinerja Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKA-K/L) pada Tahun Anggaran (TA) 2025, BRMP Maluku telah mengimplementasikan Kegiatan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, Kegiatan Dukungan Manajemen Fasilitas Perakitan dan Modernisasi Pertanian melalui beberapa subkomponen dari rincian *output* berdasarkan RKA-K/L dan POK (Petunjuk Operasional Kinerja) TA 2025. Penyusunan rencana kinerja kegiatan tersebut telah dilakukan BRMP Maluku yang mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) BSIP Tahun 2023-2025.

Tabel 2. Perjanjian Kinerja BRMP Maluku Tahun 2025

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya pelaku usaha tani yang menerapkan standar pertanian	Jumlah usahatani yang mendapatkan pendampingan penerapan standar pertanian (Jumlah Usahatani)	1
2	Tersedianya teknologi hasil perekayasa dan perakitan yang adaptif	Jumlah produksi benih/bibit sumber spesifik lokasi (Unit)	-
3	Terwujudnya Birokrasi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Maluku (Nilai)	84,74
4	Terkelolanya Anggaran Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Balai Penerapan Penerapan Modernisasi Pertanian Maluku (Nilai)	93,33

Sumber: Perjanjian Kinerja BRMP Maluku Tahun 2025

Pada rencana kinerja tersebut memuat sasaran program kegiatan yang akan dilaksanakan di tahun 2025, indikator kinerja yang merupakan hasil yang dicapai secara terukur, efektif, efisien, dan akuntabel, serta target yang akan dihasilkan dari setiap indikator kinerja yang sudah ditetapkan dalam RKA-K/L. Selanjutnya rencana kinerja yang telah disusun ditetapkan menjadi Perjanjian Kinerja (PK) balai. Sasaran, indikator kinerja dan target dalam Perjanjian Kinerja BRMP Maluku Tahun 2025 tersedia pada tabel 2. Berdasarkan PK BRMP Maluku Tahun 2025 terdapat 3 (tiga) sasaran program dengan 3 (tiga) indikator kinerja, terdiri dari:

1. Sasaran Meningkatnya pelaku usaha tani yang menerapkan standar pertanian, dengan 1 (satu) indikator kinerja: 1) Jumlah usahatani yang mendapatkan pendampingan penerapan standar pertanian (Jumlah Usahatani) target 1 Usahatani.

2. Sasaran Terwujudnya Birokrasi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima dengan indikator kinerja Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Maluku (Nilai) target 80.
3. Sasaran Terkelolanya Anggaran Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas dengan indikator kinerja, yaitu Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Balai Penerapan Penerapan Modernisasi Pertanian Maluku (Nilai) target 85.

III. AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Pengukuran Kinerja

BRMP Maluku telah menetapkan 3 (tiga) sasaran program yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025, yaitu: 1) Meningkatnya Pelaku Usaha Tani yang Menerapkan Standar Pertanian; 2) Terwujudnya Birokrasi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima; serta 3) Terkelolanya Anggaran Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas. Penetapan sasaran tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam indikator kinerja yang terukur beserta target capaian yang dituangkan secara resmi dalam Perjanjian Kinerja BRMP Maluku Tahun 2025. Sasaran strategis dan target keluaran yang ditetapkan diharapkan dapat menjadi solusi atas berbagai tantangan dan permasalahan pembangunan pertanian, terutama yang berkaitan dengan penerapan serta penyebaran standar instrumen pertanian yang sesuai dengan karakteristik spesifik lokasi.

Pengukuran kinerja instansi pemerintah dilakukan dengan membandingkan capaian aktual terhadap sasaran dan tujuan strategis yang telah ditetapkan. Penilaian keberhasilan tersebut menggunakan indikator kinerja sebagai tolak ukur, baik secara kuantitatif maupun kualitatif, yang harus jelas, terukur, relevan, dapat dicapai, efektif, serta didukung data yang dapat diolah dan dianalisis. Secara umum, indikator kinerja berfungsi untuk memperjelas pelaksanaan kegiatan serta menjadi dasar pengukuran, analisis, dan evaluasi kinerja unit kerja.

Penilaian capaian kinerja BRMP Maluku Tahun 2025 dilakukan dengan membandingkan target indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasi pelaksanaannya selama tahun berjalan. Mengacu pada Surat Edaran Nomor 1003/SE/RC.030/A/04/2023, tingkat keberhasilan kinerja diklasifikasikan ke dalam empat kategori, yaitu sangat berhasil dengan capaian di atas 100 persen, berhasil pada rentang 80–100 persen, cukup berhasil pada kisaran 60–79 persen, serta kurang berhasil apabila capaian di bawah 60 persen. Berdasarkan hasil evaluasi, kinerja BRMP Maluku Tahun 2025 mencatat nilai rata-rata sebesar 141,19 yang termasuk dalam kategori sangat berhasil. Penilaian ini didasarkan pada laporan akhir kegiatan yang disampaikan oleh masing-masing Penanggung Jawab Kegiatan kepada Kepala Balai terkait pencapaian indikator kinerja utama, serta didukung oleh hasil monitoring dan evaluasi tim monev secara selektif guna memastikan ketercapaian target setiap kegiatan. Pemantauan capaian output dilaksanakan melalui sistem pelaporan berkala bulanan, triwulanan, dan semesteran yang dilengkapi dengan informasi kendala pelaksanaan, sehingga potensi ketidaktercapaian indikator dapat diidentifikasi dan diantisipasi sejak dini. Rincian capaian kinerja BRMP Maluku Tahun 2025 disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Capaian kinerja BRMP Maluku Tahun 2025

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program				Kriteria
		Uraian	Target	Realisasi	Capaian (%)	
1	Meningkatnya pelaku usaha tani yang menerapkan standar pertanian	Jumlah usahatani yang mendapatkan pendampingan penerapan standar pertanian pada tahun berjalan dari kegiatan perbenihan, pendampingan standar, I-care dan pendampingan program strategis	1 Lembaga	1 Lembaga	100	Berhasil
2	Tersedianya teknologi hasil perekayasa dan perakitan yang adaptif	Benih/Bibit Spesifik Lokasi adalah benih atau bibit yang dikembangkan dan diproduksi berdasarkan kesesuaian dengan kondisi agroekosistem di suatu wilayah.	-	-	-	-
3	Terwujudnya Birokrasi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Zona Integritas Zona Integritas (ZI) merupakan predikat yang diberikan yang pimpinan dan jajarannya mempunyai niat (komitmen) untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui upaya pencegahan korupsi, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.	Nilai 84,74	86,10	101,60	Sangat berhasil
4	Terkelolanya Anggaran Badan Perakitan dan	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	Nilai 93,33	95,09	101,89	Sangat Berhasil

	Modernisasi Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Maluku				
Nilai rata-rata					107,867	Sangat Berhasil

Sumber: Laporan akhir, 2025

Tercapainya sasaran kegiatan di BRMP Maluku tidak dapat dipisahkan dari proses monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan secara berkelanjutan, dimulai sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga penyelesaian kegiatan guna memastikan fungsi pengendalian dan pengawasan terlaksanakan secara efektif. Evaluasi tersebut difokuskan untuk menilai tingkat ketercapaian target pada setiap kegiatan melalui pemantauan perkembangan pelaksanaan program dan capaian kinerja yang dilakukan secara rutin, baik bulanan, triwulanan, semesteran, maupun tahunan, dengan mempertimbangkan berbagai kendala dan permasalahan yang muncul. Melalui penerapan sistem ini, BRMP Maluku berkomitmen untuk memastikan seluruh program dan kegiatan dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan serta mampu menghasilkan kinerja yang optimal dan memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan mutu dan produktivitas sektor pertanian di Provinsi Maluku.



Gambar 4. Rapat perencanaan kegiatan tahun anggaran 2025



Gambar 5. Penandatanganan komitmen bersama tahun 2025



Gambar 6. Rapat evaluasi akhir kegiatan tahun anggaran 2025

Pengukuran kinerja balai juga dapat dilihat dari perkembangan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Balai dari tahun 2021 hingga 2025, yang menggambarkan perbandingan target, realisasi, serta capaian kinerja sesuai Laporan Kinerja (LAKIN) sebagai bentuk evaluasi kinerja secara berkelanjutan dari tahun ke tahun.

IKU	2022			2023			2024			2025		
	Target	Realisasi	Capaian Sesuai LAKIN	Target	Realisasi	Capaian Sesuai LAKIN	Target	Realisasi	Capaian Sesuai LAKIN	Target	Realisasi	Capaian Sesuai LAKIN
Jumlah hasil pengkajian dan pengembangan Pertanian Spesifik lokasi yang dimanfaatkan (Jumlah)	18	28	155,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Persentase hasil kegiatan pengkajian dan pengembangan pertanian spesifik lokasi yang dilaksanakan pada tahun berjalan (%)	92	92	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Standard Instrument Pertanian Yang Didiseminasikan (SNI)	-	-	-	1	1	100,00	1	1	100,00	1	1	100,00
Jumlah Lembaga Yang Menerapkan Standar Instrument Pertanian (Lembaga)	-	-	-	1	1	100,00	1	1	100,00	-	-	-
Jumlah Produksi Instrumen Pertanian Terstandar Yang Dihasilkan (Unit)	-	-	-	12	14,5	120,83	28	28	100,00	-	-	-
Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Papua (Nilai)	79	79,1	100,13	82	84,28	102,78	83	84,74	102,10	84,74	86,1	101,60
Nilai Kinerja Anggaran Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Papua (Nilai)	90	90,1	100,11	86	87,01	101,17	93,33	96,93	103,86	93,33	95,09	101,89
RERATA			100,12			104,96			101,19			101,16

Gambar 7. Perbandingan nilai Indikator Kinerja Balai tahun 2022 - 2025

Berdasarkan tabel capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2022–2025, terlihat adanya tren peningkatan kinerja yang konsisten dan berkelanjutan pada sebagian besar indikator. Pengukuran pada tahun 2022 dengan hasil yang sangat baik, ditunjukkan oleh capaian rata-rata 100,08%. Pada tahun ini, jumlah hasil pengkajian dan pengembangan pertanian spesifik lokasi melampaui target (155,56%), serta persentase pelaksanaan kegiatan mencapai target secara penuh (100%).

Kinerja semakin meningkat pada tahun 2023 dengan capaian rata-rata 104,96%. Pada periode ini mulai terlihat penguatan pada indikator standardisasi, ditandai dengan tersedianya standar instrumen pertanian yang didiseminasikan dan diterapkan oleh lembaga, serta peningkatan jumlah produksi instrumen pertanian terstandar yang melampaui target (120,83%). Selain itu, nilai

pembangunan Zona Integritas dan nilai kinerja anggaran juga mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya.

Pada tahun 2024, kinerja tetap terjaga pada level sangat baik dengan rata-rata capaian 101,19%. Seluruh indikator utama yang diukur berhasil mencapai bahkan melampaui target, khususnya pada nilai kinerja anggaran dan nilai pembangunan Zona Integritas yang menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun 2023. Jumlah produksi instrumen pertanian terstandar juga meningkat signifikan secara absolut dibandingkan tahun sebelumnya.

Memasuki tahun 2025, meskipun tidak seluruh indikator diukur, indikator yang tersedia tetap menunjukkan kinerja positif dengan capaian rata-rata 101,16%. Nilai pembangunan Zona Integritas dan nilai kinerja anggaran kembali melampaui target, menegaskan konsistensi perbaikan tata kelola, akuntabilitas, dan kinerja organisasi dari tahun ke tahun. Secara keseluruhan, tabel ini menunjukkan bahwa kinerja balai mengalami perkembangan yang stabil, progresif, dan berorientasi pada peningkatan hasil serta kualitas layanan secara berkelanjutan.

3.2. Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Kinerja

3.2.1. Meningkatnya Pelaku Usaha Tani yang Menerapkan Standar Pertanian

Sasaran program kesatu dalam Perjanjian Kinerja BRMP Maluku Tahun 2025 adalah meningkatnya pelaku usaha tani yang menerapkan standar pertanian dengan indikator kinerja, yaitu: Jumlah usahatani yang mendapatkan pendampingan penerapan standar pertanian targetnya 1 Lembaga.

Tabel 4. Capaian kinerja sasaran meningkatnya pengelolaan standar instrumen pertanian

Sasaran Program	Indikator Kinerja Program				Kriteria
	Uraian	Target	Realisasi	Capaian (%)	
Meningkatnya pelaku usaha tani yang menerapkan standar pertanian	Jumlah usahatani yang mendapatkan pendampingan penerapan standar pertanian pada tahun berjalan dari kegiatan perbenihan, pendampingan standar, l-care dan pendampingan program strategis	1 Lembaga	1 Lembaga	100	Berhasil

Sumber: Laporan akhir, 2025

Pendampingan penerapan standar instrumen pertanian merupakan langkah strategis untuk membina serta memastikan implementasi standar instrumen pertanian, seperti SNI, PTM, maupun standar mutu lainnya. Upaya ini bertujuan mendorong peningkatan produksi, produktivitas, mutu produk, nilai

tambah, serta daya saing di pasar. Rendahnya daya saing produk, disertai lemahnya perlindungan terhadap konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja, dan masyarakat, berpotensi menimbulkan kerugian yang signifikan bagi bangsa. Oleh karena itu, keberadaan standar menjadi sarana penting yang berfungsi sebagai penghubung antara pelaku usaha dan produk yang dihasilkan, sehingga mampu meningkatkan daya saing produk pertanian di pasar. Dalam konteks ini, penerapan SNI 8969:2021 tentang IndoGAP Tanaman Pangan berperan penting dalam memastikan praktik budidaya tanaman pangan dilaksanakan sesuai prinsip pertanian yang baik, berkelanjutan, aman, dan ramah lingkungan. Sementara itu, SNI 6233:2015 tentang Padi Inbrida, dimana standar ini digunakan sebagai acuan dalam pemilihan dan penggunaan benih padi inbrida bermutu untuk menjamin keseragaman pertumbuhan, produktivitas, serta mutu hasil panen.

Lokasi kegiatan pendampingan penerapan standar instrumen pertanian yang dilaksanakan BRMP Maluku tahun 2025 adalah di Kabupaten Maluku Tengah. Lembaga yang didampingi adalah Kelompok Tani Usaha Baru di Desa Makariki, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah. Kegiatan pendampingan dilakukan berupa bimbingan teknis (bimtek) IndoGAP Tanaman Pangan dengan menerapkan prinsip-prinsip GAP sesuai SNI 8969:2021, mulai dari persiapan lahan hingga panen dan pencatatan kegiatan usaha tani. Kemudian, bimbingan teknis (bimtek) penanganan pascapanen tanaman padi yang difokuskan pada teknik panen yang tepat, penanganan gabah pascapanen, pengeringan, penyimpanan, dan pengurangan kehilangan hasil (losses) agar mutu gabah tetap terjaga dan bernilai jual lebih tinggi. Selain itu, di tahun 2025, BRMP Maluku masih melanjutkan pendampingan pada Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Gempa Tani di Desa Waimital, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat. Pendampingan ini mencakup areal seluas kurang lebih 10 hektare, yang dikelola oleh 5 kelompok tani dengan 13 orang petani. Kegiatan pendampingan dilakukan berupa bimbingan teknis (bimtek) pemupukan presisi dengan penggunaan PUTS dan BWD, pengukuran tingkat pengetahuan petani, serta evaluasi terhadap pelaksanaan pendampingan pada tahun sebelumnya.

Capaian kinerja kegiatan penerapan standar instrumen pertanian pada tahun 2025 sesuai target, yaitu menghasilkan 1 (satu) lembaga yang menerapkan standar instrumen pertanian SNI 8969:2021 Indonesian good agricultural practices (IndoGAP) – Cara budidaya tanaman pangan yang baik dan SNI 6233:2015 tentang padi inbrida pada Kelompok Tani Usaha Baru di Desa Makariki, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah.

3.2.2. Tersedianya Teknologi Hasil Perekayasaan dan Perakitan yang Adaptif

Sasaran program kedua dalam Perjanjian Kinerja BRMP Maluku Tahun 2025 adalah tersedianya teknologi hasil perekayasaan dan perakitan yang adaptif dengan indikator kinerja, yaitu Jumlah Produksi Benih/Bibit Sumber Spesifik

Lokasi. Namun demikian, pada Tahun Anggaran 2025 BRMP Maluku tidak mendapatkan alokasi anggaran sehingga kegiatan ini tidak dapat terlaksana.

3.2.3. Terwujudnya Birokrasi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima

Sasaran program ketiga dalam Perjanjian Kinerja BRMP Maluku Tahun 2025 adalah terwujudnya birokrasi badan perakitan dan modernisasi pertanian yang efektif dan efisien, dan berorientasi pada layanan prima dengan indikator kinerja, yaitu Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Maluku dengan target 84,74.

Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya telah berkomitmen penuh untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) melalui reformasi birokrasi, terutama dalam upaya menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan, bertanggung jawab, dan didukung oleh pelayanan publik yang berkualitas. Zona Integritas (ZI) merupakan gambaran penerapan reformasi birokrasi dalam lingkup unit kerja yang bertujuan membentuk unit pelayanan yang unggul, berintegritas, dan memiliki kinerja optimal. Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) berfungsi sebagai etalase nyata yang mencerminkan implementasi reformasi birokrasi secara konkret. Melalui pembangunan Zona Integritas (ZI), unit kerja diarahkan menjadi model pelayanan yang menitikberatkan pada pencegahan korupsi serta peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat.

Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Maluku berkomitmen membangun tata kelola birokrasi yang profesional, efektif dan efisien dengan fokus pada penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas. Pada tahun 2025, BRMP Maluku menetapkan target nilai 80 dalam pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Untuk mencapai target tersebut, BRMP Maluku melaksanakan beberapa strategi, meliputi: 1) penguatan komitmen pimpinan dan seluruh pegawai dalam pelaksanaan reformasi birokrasi, 2) peningkatan kemudahan dan kualitas pelayanan melalui penyediaan sarana dan prasarana serta pemanfaatan teknologi, 3) penyusunan program yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat, 4) pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan, 5) pengelolaan media dan komunikasi publik secara strategis guna memastikan informasi terkait kegiatan dan inovasi perubahan dapat tersampaikan kepada masyarakat.

Komponen Penilaian Zona Integritas pada Lembar Kerja Evaluasi (LKE) berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 Tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah sesuai pada tabel 6 dan tabel 7.

Tabel 5. Komponen Pengungkit

No.	Komponen Pengungkit	Bobot (60%)
	Pemenuhan dan Reform	
1	Manajemen Perubahan	8%
2	Penataan Tatalaksana	7%
3	Penataan Sistem Manajemen SDM	10%
4	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	10%
5	Penguatan Pengawasan	15%
6	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	10%

Sumber: Permen PANRB Nomor 90 Tahun 2021

Komponen pengungkit terdiri atas 2 (dua) kriteria penilaian, yaitu aspek pemenuhan dan reform. Aspek pemenuhan dinilai melalui sejumlah pertanyaan yang bersifat verifikatif dan disusun sesuai dengan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) sebagaimana diatur dalam ketentuan sebelumnya. Sementara itu, aspek reform dinilai melalui pertanyaan yang mencerminkan adanya perubahan pada enam area pengungkit. Masing-masing kriteria tersebut memiliki bobot penilaian sebesar 50 persen (50%) dari bobot per komponen pengungkit.

Adapun komponen hasil menggambarkan tingkat pencapaian sasaran reformasi birokrasi, yang meliputi terwujudnya birokrasi yang bersin dan akuntabel serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Setelah Tim Penilai Internal (TPI) melakukan penilaian internal terhadap pembangunan Zona Integritas (ZI) pada unit kerja/satuan kerja berdasarkan LKE yang berlaku, hasil penilaian tersebut selanjutnya disampaikan kepada pimpinan instansi pemerintah sebagai bahan evaluasi atas kualitas pembangunan Zona Integritas pada unit kerja atau satuan kerja.

Tabel 6. Komponen Hasil

No.	Komponen Hasil	Bobot (40%)
Birokrasi Yang Bersih dan Akuntabel (22,50)		
1	Survei Persepsi Anti Korupsi	17,50
2	Capaian Kinerja	5,00
Pelayanan Publik Yang Prima (17,50)		
1	Survei Persepsi Pelayanan Publik	17,50

Sumber: Permen PANRB Nomor 90 Tahun 2021

Syarat unit kerja/satuan kerja yang dapat ditetapkan sebagai Menuju WBK/WBBM sesuai tabel 8.

Tabel 7. Persyaratan penetapan unit kerja/satuan kerja menuju WBK/WBBM

Syarat	Menuju WBK	Menuju WBBM
Nilai Total	75	85
		Telah mendapatkan predikat Menuju WBK
Nilai Minimal Pengungkit	40	48
Bobot nilai minimal per area pengungkit	60%	75%
Nilai komponen Hasil "Pemerintah yang Bersih dan Akuntabel" minimal	18,25	19,50
• Nilai sub-komponen "Survei Persepsi Anti Korupsi" minimal	15,75 (survey 3,60)	15,75 (survey 3,60)

• Nilai sub-komponen “Kinerja Lebih Baik” minimal	2,50	3,75
Nilai komponen Hasil “Pelayanan Publik yang prima” minimal	14,00 (survey 3,20)	15,75 (survey 3,60)

Sumber: Permen PANRB Nomor 90 Tahun 2021

Tabel 8. Capaian kinerja sasaran terwujudnya birokrasi badan perakitan dan modernisasi pertanian yang efektif dan efisien, dan berorientasi pada layanan prima

Sasaran Program	Indikator Kinerja Program				Kriteria
	Uraian	Target	Realisasi	Capaian (%)	
Terwujudnya Birokrasi Badan Perakitan dan Moedernisasi Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Maluku	Nilai 84,74	86,10	101,60	Sangat berhasil

Sumber: data primer, 2025

Capaian kinerja untuk sasaran program terwujudnya birokrasi badan perakitan dan modernisasi pertanian yang efektif dan efisien, dan berorientasi pada layanan prima tahun 2025 sudah melampaui dari target, yaitu 86,10 (101,60%) dari target 84,74 berdasarkan hasil penilaian mandiri tahun 2025 oleh tim penilai dari Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pascapanen Pertanian terhadap pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Maluku. Capaian tersebut menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, di mana nilai kinerja mengalami kenaikan sebesar 1,60% dari angka 84,74 menjadi 86,10. Selain itu, berdasarkan nilai evaluasi birokrasi pada komponen pengungkit dan hasil di seluruh area perubahan telah memperoleh nilai yang baik dan memenuhi syarat untuk melanjutkan proses menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Capaian ini menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, di mana pada saat masih berstatus sebagai Balai Standardisasi Instrumen Pertanian Maluku, belum seluruh area perubahan memenuhi nilai minimal sehingga belum dapat diusulkan menuju WBK. Peningkatan capaian tersebut mencerminkan penguatan pelaksanaan reformasi birokrasi yang lebih efektif dan terintegrasi pada tahun berjalan.

Tabel 9. Hasil penilaian lembar kerja evaluasi zona integritas

Area Perubahan		Bobot	Pemenuhan	Reform	Nilai	%	Pemenuhan Nilai Min
A. PENGUNGKIT		60,00					
	1. MANAJEMEN PERUBAHAN	8,00	2,88	4,00	6,88	85,99%	OK
	2. PENATAAN TATALAKSANA	7,00	2,56	2,34	4,89	69,88%	OK
	3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR	10,00	4,11	3,25	7,36	73,57%	OK
	4. PENGUATAN AKUNTABILITAS	10,00	4,01	5,00	9,01	90,10%	OK
	5. PENGUATAN PENGAWASAN	15,00	6,29	6,88	13,17	87,77%	OK
	6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	10,00	3,87	3,75	7,62	76,24%	OK
TOTAL PENGUNGKIT					48,93	81,55%	OK
B. HASIL		40,00					
	I. BIROKRASI YANG BERSIH DAN AKUNTABEL	22,50			20,51	91,14%	OK
	a. Nilai Survey Persepsi Korupsi (Survei Eksternal :	17,50			16,76	95,75%	OK
	b. Capaian Kinerja Lebih Baik dari pada Capaian Kinerja	5,00			3,75	75,00%	OK
	II. PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA	17,50			16,67	95,25%	
	- Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Survei Eksternal :	17,50			16,67	95,25%	OK
TOTAL HASIL					37,18	92,94%	
NILAI EVALUASI REFORMASI BIROKRASI					86,10		OK

Sumber: Penilaian mandiri pembangunan zona integritas lingkup BRMP, 2025

Hasil Penilaian Mandiri ZI tahun 2025 BRMP Maluku oleh tim penilai dari Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pascapanen Pertanian mendapatkan nilai evaluasi reformasi birokrasi 86,92 (tabel 10) dengan rincian sebagai berikut: A. Pengungkit nilai 50,50 terdiri dari 6 (enam) area perubahan, yaitu 1) manajemen perubahan nilai 6,88, 2) penataan tatalaksana nilai 4,89, 3) penataan system manajemen SDM aparatur nilai 7,36, 4) penguatan akuntabilitas nilai 9,01, 5) penguatan pengawasan nilai 13,57, dan 6) peningkatan kualitas pelayanan publik nilai 7,62, dan B. Hasil nilai 37,18 terdiri dari 2 (dua) area perubahan, yaitu 1) birokrasi yang bersih dan akuntabel diperoleh nilai 20,51 meliputi subkomponen nilai survei persepsi korupsi (survei eksternal: indeks persepsi anti korupsi/IPAK) nilai 16,76 dan subkomponen capaian kinerja lebih baik dari pada capaian kinerja sebelumnya dengan nilai 3,75, 2) pelayanan publik yang prima dengan nilai 16,67 dari subkomponen nilai persepsi kualitas pelayanan (survei eksternal: indeks persepsi kualitas pelayanan publik/IPKP) dengan nilai 16,67. Hasil nilai evaluasi reformasi birokrasi BRMP Maluku pada penilaian mandiri ZI tahun 2025 sesuai tabel 10 tersebut menunjukkan bahwa BRMP Maluku sudah memenuhi kriteria menuju WBK WBBM karena semua nilai area perubahan melampaui nilai minimal persyaratan penetapan unit kerja/satuan kerja menuju WBK/WBBM.

Evaluasi selanjutnya pada area perubahan penataan tata laksana menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan. Hingga saat ini, satuan kerja belum memiliki inovasi dalam penyusunan dan penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang adaptif dan berbasis pembaruan. Selain itu, sistem pengukuran kinerja unit kerja, operasionalisasi manajemen sumber daya manusia, serta pemberian pelayanan kepada publik belum didukung oleh inovasi yang memanfaatkan teknologi informasi secara optimal. Kondisi tersebut menjadi perhatian untuk ditindaklanjuti melalui pengembangan inovasi tata kelola berbasis digital guna meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan kualitas layanan organisasi ke depan.

3.2.4. Terkelolanya Anggaran Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas

Sasaran program keempat dalam Perjanjian Kinerja BRMP Maluku Tahun 2025 adalah terkelolanya anggaran Badan perakitan dan modernisasi Pertanian yang akuntabel dan berkualitas dengan indikator kinerja, yaitu Nilai Indikator Kerja Pelaksanaan Anggaran Balai Penerapan Pertanian Maluku dengan target 85. Sasaran program keempat dilaksanakan melalui kegiatan perencanaan dan pelaksanaan anggaran BRMP Maluku TA 2025. Kinerja sasaran ini diukur melalui nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA).

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat IKPA merupakan indikator kinerja yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara dan/atau pengelola fiskal untuk menilai kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian/Lembaga. Pengukuran IKPA meliputi beberapa aspek:

- a. kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran dengan indikator kinerja untuk pengukuran dan penilaian, yaitu: 1) revisi DIPA dan 2) deviasi halaman III DIPA.
- b. kualitas implementasi pelaksanaan anggaran dengan indikator kinerja untuk pengukuran dan penilaian, yaitu: 1) penyerapan anggaran, 2) belanja kontraktual, 3) penyelesaian tagihan, 4) pengelolaan Uang Persediaan dan Tambahan Uang Persediaan (UP dan TUP) dan 5) dispensasi Surat Perintah Membayar (SPM).
- c. kualitas hasil pelaksanaan anggaran dengan indikator kinerja untuk pengukuran dan penilaian, yaitu capaian *output*.

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2025 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga untuk Nilai IKPA dikategorikan menjadi:

- a. sangat baik, apabila nilai IKPA ≥ 95
- b. baik, apabila $89 \leq \text{nilai IKPA} < 95$
- c. cukup, apabila $70 \leq \text{nilai IKPA} < 89$
- d. kurang, apabila nilai IKPA < 70 .

Nilai IKPA digunakan sebagai instrumen untuk pengendalian dan pemantauan kinerja anggaran, serta sebagai dasar pelaksanaan evaluasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan anggaran belanja Kementerian/Lembaga. Selain itu, nilai IKPA menjadi salah satu komponen dalam penilaian Nilai Kinerja Anggaran (NKA) sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, serta akuntansi dan pelaporan keuangan.

Nilai IKPA BRMP Maluku tahun 2025 adalah 95,09 dengan uraian sebagai berikut:

- a. Kualitas Perencanaan Anggaran dengan nilai 88,50 terdiri dari Revisi DIPA (100) dan Deviasi Halaman III DIPA (76,99).
- b. Kualitas Pelaksanaan Anggaran dengan nilai 97,71 terdiri dari Penyerapan Anggaran (99,80), Belanja Kontraktual (0), Penyelesaian Tagihan (0), Pengelolaan UP dan TUP (95,61) dan Dispensasi SPM (pengurang) 0.
- c. Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran dengan nilai 100,00 yang berasal dari Capaian *Output* (100,00).

**INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN
BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN MALUKU**

Periode s.d. Desember

No.	Periode	Kode KPPN	Kode BA	Satuan Kerja	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/ Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
1	Desember	061	018	567737 BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN MALUKU	Nilai	100,00	76,99	99,80	0,00	0,00	95,61	100,00	76,07	80%	0,00	95,09
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10,00	11,55	19,96	0,00	0,00	9,56	25,00				
					Nilai Aspek	88,50		97,71				100,00				

Gambar 8. Nilai IKPA tahun 2025

Berdasarkan hasil penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) sampai dengan periode Desember, Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Maluku memperoleh nilai akhir sebesar 95,09. Capaian tersebut termasuk dalam kategori sangat baik, yang mencerminkan kinerja pelaksanaan anggaran yang optimal. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran telah dilaksanakan secara efektif, efisien, tertib administrasi, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga mampu mendukung pencapaian output dan sasaran kinerja satuan kerja secara maksimal.

Namun demikian, pada aspek kualitas perencanaan anggaran masih terdapat catatan, khususnya pada revisi halaman III DIPA yang memperoleh nilai relatif lebih rendah. Kondisi ini disebabkan oleh adanya penyesuaian jadwal kegiatan dan rencana penarikan dana yang belum sepenuhnya selaras dengan realisasi pelaksanaan kegiatan. Sebagai tindak lanjut, BRMP Maluku melakukan perbaikan melalui penyusunan perencanaan yang lebih realistis, penguatan koordinasi antara perencana dan pelaksana kegiatan, serta monitoring berkala terhadap rencana penarikan anggaran agar ke depan revisi halaman III DIPA dapat diminimalkan dan nilai kinerja anggaran semakin meningkat.

Tabel 10. Capaian kinerja sasaran terkelolanya anggaran badan perakitan dan modernisasi pertanian yang akuntabel dan berkualitas

Sasaran Program	Indikator Kinerja Program				Kriteria
	Uraian	Target	Realisasi	Capaian (%)	
Terkelolanya Anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Maluku	Nilai 93,33	95,09	101,89	Sangat Berhasil

Sumber: data primer, 2025

Capaian kinerja sasaran terkelolanya anggaran badan perakitan dan modernisasi Pertanian yang akuntabel dan berkualitas tahun 2025 dengan indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) BRMP Maluku melebihi target, yaitu 95,09 (101,89 persen). Hasil yang sangat baik ini harus dapat dipertahankan untuk tahun selanjutnya.

3.2.4. Capaian BRMP Maluku

Keberhasilan Balai selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam memperoleh predikat Informatif merupakan wujud nyata komitmen organisasi dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik secara transparan, akuntabel, dan berkelanjutan. Predikat ini menunjukkan bahwa Balai telah mampu memenuhi seluruh indikator penilaian keterbukaan informasi publik, mulai dari ketersediaan informasi, pelayanan informasi yang responsif, hingga pengelolaan dokumentasi yang tertata dan mudah diakses oleh masyarakat.

Kesuksesan tersebut tidak terlepas dari penguatan tata kelola PPID yang dilakukan secara konsisten, antara lain melalui penyediaan informasi publik yang lengkap dan mutakhir, optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi melalui website dan media pendukung lainnya, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola PPID. Selain itu, adanya koordinasi yang baik antar unit kerja turut mendukung kelancaran penyediaan dan penyampaian informasi kepada publik.

Dengan diraihnya predikat Informatif, Balai menunjukkan keseriusannya dalam mendukung pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja institusi. Capaian ini sekaligus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas layanan informasi publik agar semakin profesional, inklusif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

3.3. Realisasi Keuangan

Pada awal 2025 pagu awal BRMP Maluku sebesar Rp 5.500.768.000,-. Seiring dengan dinamika penganggaran, pada 2025 BRMP Maluku total melakukan revisi sebanyak 17 kali. Revisi mayoritas dilakukan menyikapi arahan *top down* meliputi: kebijakan efisiensi anggaran di awal tahun, blokir-buka blokir, penambahan anggaran kegiatan pendampingan; penyesuaian belanja pegawai termasuk P3K. Kemudian juga revisi pemukakiran halaman III DIPA. Hingga akhir 2025 pagu BRMP Maluku sebesar Rp 6.467.386.000. Namun terdapat blokir sebesar Rp 707.940.000,-.

Blokir tersebut terdapat pada kegiatan Pendampingan Program Strategis Kementan (Rp 360.000.000,-); Kegiatan Lingkup Layanan Umum (40.335.000); serta Kegiatan Layanan Monev (7.605.000). Apabila angka blokir tidak diperhitungkan, maka pagu efektif BRMP Maluku TA 2025 sebesar Rp 6.059.446.000,- dengan realisasi mencapai 99,44%. Rincian realisasi per kegiatan sebagaimana Tabel 12.

Tabel 12. Realisasi Anggaran Kegiatan TA 2025

No.	Kegiatan	Pagu Efektif (Rp. .000)	Realisasi (%)
1.	Diseminasi Standar Instrumen Pertanian	97.528	75,34
2.	Pendampingan Program Strategis Kementerian Pertanian	622.000	99,48
3.	Pelaksanaan Pengelolaan BMN	10.000	100,00
4.	Pengelolaan Informasi Publik	25.287	97,88
5.	Penyusunan Program dan Anggaran	13.780	98,67
6.	Layanan Penerapan SIP dan Pengelolaan Produk Hasil Standardisasi	15.750	99,68
7.	Layanan Keuangan	18.120	99,84
8.	Layanan Ketatausahaan, Rumah Tangga, Kearsipan, dan Perlengkapan	15.060	98,89
9.	Sinkronisasi Kegiatan	20.400	97,76
10.	Gaji dan Tunjangan	3.165.658	99,95
11.	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	2.017.200	99,91
12.	Layanan Pemantauan dan Dokumentasu	27.395	99,82

Sumber: data primer, 2025

IV. PENUTUP

Laporan Kinerja Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Maluku Tahun Anggaran 2025 menjadi bukti nyata komitmen dan kerja keras seluruh jajaran dalam mendukung pembangunan pertanian di Provinsi Maluku. Capaian kinerja yang berada pada kategori sangat berhasil dengan rata-rata 101,16 persen menunjukkan bahwa BRMP Maluku mampu melampaui target yang ditetapkan, sekaligus memperkuat posisi sebagai garda terdepan modernisasi pertanian di wilayah kepulauan.

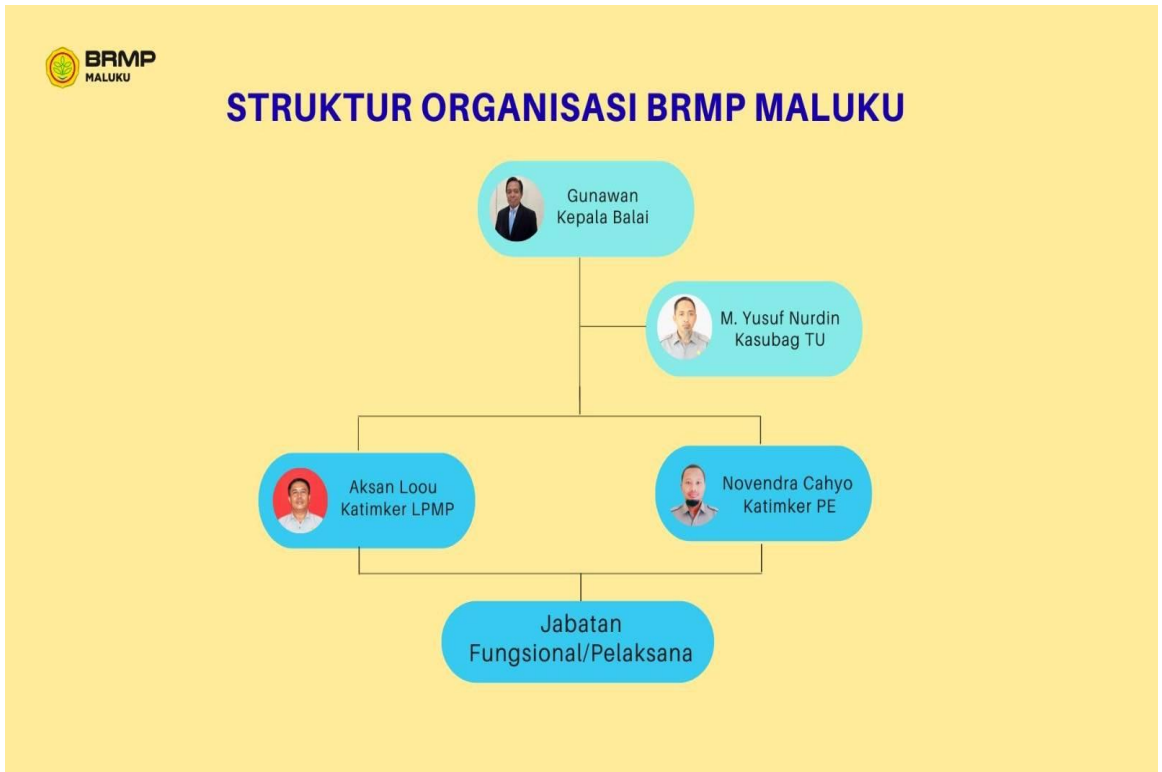
Keberhasilan ini tidak hanya mencerminkan efektivitas program dan kegiatan, tetapi juga menegaskan bahwa BRMP Maluku memiliki fondasi yang kuat untuk terus berinovasi, memperluas jejaring, dan meningkatkan kualitas layanan. Dengan dukungan teknologi pertanian spesifik lokasi, tata kelola birokrasi yang semakin profesional, serta pengelolaan anggaran yang akuntabel, BRMP Maluku siap menghadapi tantangan masa depan dengan penuh keyakinan.

Semangat kebersamaan, sinergi lintas sektor, dan dedikasi seluruh pegawai serta mitra kerja menjadi modal berharga untuk melangkah lebih jauh. BRMP Maluku optimis bahwa capaian tahun 2025 akan menjadi pijakan strategis bagi peningkatan produktivitas, daya saing, dan keberlanjutan pertanian Maluku di tahun-tahun mendatang.

Dengan tekad yang kuat, BRMP Maluku akan terus bertransformasi menjadi lembaga unggul dalam perekayasaan dan perakitan teknologi pertanian terapan modern, serta menjadi mitra terpercaya bagi petani dan pemangku kepentingan dalam mewujudkan pertanian Maluku yang maju, mandiri, dan berdaya saing global.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Struktur Organisasi Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Maluku Tahun 2025



Lampiran 2. Data Kepegawaian Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP)
Maluku Tahun 2025

a. Jumlah pegawai berdasarkan jenis kelamin dan golongan

No	Jenis Kelamin	Golongan				Jumlah	Golongan				Jumlah	Golongan					Jumlah	Golongan V	Golongan X	Jumlah	Total					
		I/a	I/b	I/c	I/d		II/a	II/b	II/c	II/d		III/a	III/b	III/c	III/d	IV/a						IV/b	IV/c	IV/d	IV/e	
1	Laki-Laki	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	7	6	2	4	19	2	0	0	0	0	2	4	1	5	28
2	Perempuan	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	7	4	3	0	14	0	0	0	0	0	0	4	2	6	23
	Jumlah	0	0	0	0	0	0	0	5	0	5	13	10	5	4	32	2	0	0	0	0	2	8	3	11	51

Sumber: SIM ASN

b. Jumlah pegawai berdasarkan usia dan pendidikan terakhir

No	Usia(Thn)	S3	S2	S1	D4	D3	D2	D1	SLTA	SLTP	SD	Jumlah
1	<=20			0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	21-25	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	3
3	26-30	0	0	3	2	0	0	0	0	0	0	5
4	31-35	0	0	2	1	3	0	0	1	0	0	7
5	36-40	0	2	0	0	0	0	0	3	0	0	5
6	41-45	0	0	2	1	0	0	0	1	0	0	4
7	46-50	1	1	5	0	0	0	0	4	0	0	11
8	51-55	0	1	1	1	0	0	0	7	1	0	11
9	56-60	0	2	2	0	1	0	0	0	0	0	5
10	>60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jumlah	1	6	17	5	5	0	0	16	1	0	51

Sumber: SIM ASN

Lampiran 3. Perjanjian Kinerja Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Maluku Tahun 2025



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN MALUKU
Jl. Chr. Soplanit, Rumah Tiga – Ambon 97233
Telepon (0911) 322542, Faksimili (0911) 322542
Website : www.bsip-maluku.pertanian.go.id, e-mail : bsipmaluku@pertanian.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Kardiyono
Jabatan : Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Maluku

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Fadjry Djufry
Jabatan : Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 30 Desember 2024

Pihak Kedua


Fadry Djufry

Pihak Pertama


Kardiyono

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN MALUKU**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	1. Jumlah Standar Instrumen Pertanian yang Didiseminasikan (SNI)	1
		2. Jumlah Lembaga yang Menerapkan Standar Instrumen Pertanian (Lembaga)	-
2	Meningkatnya Produksi Instrumen Pertanian Terstandar	Jumlah Produk Instrumen Pertanian Terstandar yang Dihasilkan (Unit)	-
3	Terwujudnya Birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Maluku (Nilai)	80
4	Terkelolanya Anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Maluku (Nilai)	85

No.	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
1	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	Rp 117.714.000
	Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	Rp 117.714.000
2	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	Rp -
	Pengelolaan Produk Instrumen Pertanian Terstandar	Rp -
3	Program Dukungan Manajemen	Rp 5.383.054.000
	Dukungan Manajemen Fasilitasi Standardisasi Instrumen Pertanian	Rp 5.383.054.000

Jakarta, 30 Desember 2024

Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian


Fadry Djufry

Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Maluku


Kartiyo

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TA 2025

Sasaran	Indikator	Kegiatan	Target	Satuan
Meningkatnya Produksi Instrumen Pertanian Terstandar	Jumlah Produk Instrumen Pertanian	Produksi Benih Padi	-	Ton
	Terstandar yang Dihasilkan (Unit)	Produksi Benih Jagung	-	Ton
TOTAL			UNIT	



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN MALUKU
Jl. Chr. Soplanit, Rumah Tiga – Ambon 97234
Telepon (0911) 322542, Faksimile (0911) 322542
WEBSITE : maluku.brmp.pertanian.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Gunawan

Jabatan : Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Maluku

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Fadry Djufry

Jabatan : Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Jakarta, 23 Mei 2025
Pihak Pertama

Fadry Djufry

Gunawan

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN MALUKU**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya pelaku usaha tani yang menerapkan standar pertanian	Jumlah usahatani yang mendapatkan pendampingan penerapan standar pertanian (Jumlah Usahatani)	1
2	Tersedianya teknologi hasil perekayasa dan perakitan yang adaptif	Jumlah produksi benih/ bibit sumber spesifik lokasi (Unit)	-
3	Terwujudnya Birokrasi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Nilai Pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Maluku (Nilai)	80
4	Terkelolanya Anggaran Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Maluku (Nilai)	85

No.	PROGRAM/KEGIATAN		ANGGARAN
1	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	Rp	117.714.000
	Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Bidang Pertanian	Rp	117.714.000
2	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	Rp	0
	Perakitan dan Modernisasi Pertanian	Rp	0
3	Program Dukungan Manajemen	Rp	6.283.054.000
	Dukungan Manajemen Fasilitas Perakitan dan Modernisasi Pertanian	Rp	6.283.054.000

Total anggaran terblokir senilai Rp. 542.864.000, terdiri dari:

- Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri Rp 117.714.000
- Program Ketersediaan Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas Rp 0
- Program Dukungan Manajemen Rp. 425.150.000

Pihak Kedua


Fadry Djufray

Pihak Pertama


Gunawan

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TA 2025

Sasaran	Indikator	Kegiatan	Target	Satuan
Tersedianya teknologi hasil perekayasaan dan perakitan yang adaptif	Jumlah produksi benih/ bibit sumber spesifik lokasi (Unit)	Produksi Benih Padi kelas FS	0	Ton
		Produksi Benih Padi kelas SS	0	Ton
		TOTAL		Ton



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN MALUKU
Jl. Chr. Soplanit, Rumah Tiga – Ambon 97234
Telepon (0911) 322542, Faksimile (0911) 322542
WEBSITE : maluku.bmp.pertanian.go.id, E-MAIL : brmp.maluku@pertanian.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Gunawan
Jabatan : Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Maluku

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Fadry Djufry
Jabatan : Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Fadry Djufry

Jakarta, Desember 2025
Pihak Pertama

Gunawan

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN PROVINSI MALUKU

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Lembaga
1	Terwujudnya penerapan standar pertanian oleh pelaku usaha tani	Jumlah lembaga penerap standar yang mendapatkan pendampingan (Jumlah)	1	Lembaga
2	Tersedianya teknologi modernisasi pertanian yang adaptif	Jumlah teknologi pertanian yang adaptif (Teknologi)	-	Teknologi
		Jumlah benih/ bibit sumber spesifik Lokasi yang dihasilkan	-	Unit
3	Terwujudnya penerapan pertanian modern oleh petani	Jumlah petani yang menerapkan teknologi digital, <i>smart farming</i> , dan modern (Jumlah)	-	Orang
		LAINNYA		
4	Terwujudnya Birokrasi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Nilai Pembangunan zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Provinsi Maluku (Nilai)	84.74	Nilai (0-100)
5	Terkelolanya Anggaran Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Provinsi Maluku (Nilai)	93,33	Nilai (0-100)

Kode	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN	
EC	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	Rp	97.528.000
7911	Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Bidang Pertanian	Rp	97.528.000
HA	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	Rp	0
7912	Perakitan dan Modernisasi Pertanian	Rp	0
WA	Program Dukungan Manajemen	Rp	6.369.858.000
6918	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya pada Badan Perakitan Modernisasi Pertanian	Rp	6.369.588.000
		Rp	6.467.386.000

Total anggaran terblokir senilai Rp. 407.490.000, terdiri dari:
 Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri Rp. 0,-
 Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas Rp. 0,-
 Program Dukungan Manajemen Rp. 407.490.000

Pihak Kedua

Fadjry Djufry

Pihak Pertama



Gunawan

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TA 2025

Sasaran	Indikator	Kegiatan	Target	Satuan
Tersedianya teknologi modernisasi pertanian yang adaptif	Jumlah benih/ bibit sumber spesifik Lokasi yang dihasilkan	Produksi Benih Padi kelas FS	-	ton
		Produksi Benih Padi kelas SS	-	ton
		Produksi Calon Benih FS	-	Ton
		Produksi Calon SS	-	ton
		Total	-	ton

Lampiran 4. Realisasi Anggaran Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Maluku Tahun Anggaran 2025

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2025

Per Program;
Periode Desember 2025

Kementerian : 018 KEMENTERIAN PERTANIAN

Unit Organisasi : 09 BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN

Satuan Kerja : 567737 Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Maluku

Hal 1 dari 1

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
JUMLAH SELURUHNYA	6,059,446,000	0	5,203,069,498	622,413,837	6,025,483,335	99.44 %	33,962,665
EC Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	97,528,000	0	65,517,000	7,962,000	73,479,000	75.34 %	24,049,000
WAProgram Dukungan Manajemen	5,961,918,000	0	5,137,552,498	814,451,837	5,952,004,335	99.83 %	9,913,665

Lampiran 5. Manual IKU Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Maluku Tahun Anggaran 2025

**MANUAL IKU
BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN**

MANUAL INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	
Sasaran Kegiatan (SK)	Meningkatnya Pelaku Usaha Tani yang Menerapkan Standar Pertanian
Kode IKSK	01
Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	Jumlah usahatani yang mendapatkan pendampingan penerapan standar pertanian (Jumlah Usahatani)
Definisi	Jumlah usahatani yang mendapatkan pendampingan penerapan standar pertanian pada tahun berjalan dari kegiatan perbenihan, pendampingan standar, I care dan pendampingan program strategis
Bukti realisasi/pemenuhan IKSK	Dokumen
Formula/Cara menghitung	Jumlah usahatani yang mendapatkan pendampingan penerapan standar pertanian pada tahun berjalan dari kegiatan perbenihan, pendampingan standar, I care dan pendampingan program strategis
Klasifikasi target	Maximize
Sumber data	Penanggungjawab Kegiatan
Cara pengambilan data	Menghitung jumlah usahatani yang mendapatkan pendampingan penerapan standar pertanian pada tahun berjalan melalui dokumen kegiatan produksi benih sumber spesifik lokasi, ICARE dan Lembaga Penerap Standar yang didampingi
Catatan khusus	Menghitung seluruh jumlah usahatani yang mendapatkan pendampingan, tidak dibatasi oleh komoditas.
Pihak yang melakukan pengukuran IKSK/sumber IKSK	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Maluku

**MANUAL IKU
BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN**

MANUAL INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	
Sasaran Kegiatan (SK)	Tersedianya teknologi hasil perekayasa dan perakitan yang adaptif
Kode IKSK	02
Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	Jumlah produksi benih/bibit sumber spesifik lokasi (unit)
Definisi	Benih/Bibit Spesifik Lokasi adalah benih atau bibit yang dikembangkan dan diproduksi berdasarkan kesesuaian dengan kondisi agroekosistem di suatu wilayah.
Bukti realisasi/pemenuhan IKSK	Dokumen
Formula/Cara menghitung	Jumlah benih/bibit sumber spesifik lokasi yang dihasilkan
Klasifikasi target	Maximize
Sumber data	Penanggungjawab Kegiatan
Cara pengambilan data	Menghitung Jumlah benih/bibit sumber spesifik lokasi yang dihasilkan
Catatan khusus	• Total benih yang dihitung adalah benih tersertifikasi • Jika benih tahun berjalan belum tersertifikasi dapat menggunakan data potensi benih yang akan tersertifikasi • Satuan unit yang dimaksud untuk produksi benih adalah ton
Pihak yang melakukan pengukuran IKSK/sumber IKSK	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Maluku

**MANUAL IKU
BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN**

MANUAL INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	
Sasaran Kegiatan (SK)	Terwujudnya Birokrasi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima
Kode IKSK	03
Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Maluku (Nilai)
Definisi	Zona Integritas Zona Integritas (ZI) merupakan predikat yang diberikan yang pimpinan dan jajarannya mempunyai niat (komitmen) untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui upaya pencegahan korupsi, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Bukti realisasi/ pemenuhan IKSK	Hasil penilaian Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Maluku yang dikeluarkan oleh Inspektorat Jenderal
Formula/Cara menghitung	1. Untuk satker yang dinilai oleh Inspektorat Jenderal, Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM berdasarkan nilai yang dikeluarkan oleh Tim PNPRB Inspektorat Jenderal 2. Untuk satker yang belum dinilai oleh Inspektorat Jenderal, Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM berdasarkan nilai hasil survey Tim Penilai PMPRB BRMP
Klasifikasi target	Maximize
Sumber data	Tim Inspektorat Jenderal dan Tim Penilai BRMP
Cara pengambilan data	Melalui pemeriksaan dan survey Tim Penilai PNPRB Itjen dan Tim Penilai BBPPMP ke Satker
Catatan khusus	Perhitungan nilai ZI menuju WBK/WBBM mengacu pada Permenpan RB nomor 90 tahun 2021. Penetapan WBK 1. Memiliki nilai total (pengungkit dan hasil) minimal 75; 2. memiliki nilai komponen hasil "Terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN" minimal 18,25 dengan nilai sub komponen Survei Persepsi Anti Korupsi minimal 15,75 dan sub komponen Kinerja Lebih Baik minimal 2,5; 3. Memiliki nilai komponen hasil "Pelayanan Publik yang Prima" minimal 14,00 Penetapan WBBM 1. Memiliki nilai total (pengungkit dan hasil) minimal 85; 2. memiliki nilai komponen hasil "Terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN" minimal 19,50 dengan nilai sub

	komponen Survei Persepsi Anti Korupsi minimal 15,75 dan sub komponen Kinerja Lebih Baik minimal 3,75; 3. Memiliki nilai komponen hasil "Pelayanan Publik yang Prima" minimal 15,75
Pihak yang melakukan pengukuran IKSK/sumber IKSK	Tim Penilai PMPRB Itjen dan Tim Penilai BRMP

**MANUAL IKU
BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN**

MANUAL INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	
Sasaran Kegiatan (SK)	Terkelolanya Anggaran Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas
Kode IKSK	04
Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Maluku (Nilai)
Definisi	- Kinerja Anggaran adalah capaian Kinerja atas penggunaan anggaran Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Maluku yang tertuang dalam dokumen anggaran digunakan sebagai instrumen penganggaran berbasis kinerja untuk pelaksanaan fungsi akuntabilitas dan fungsi peningkatan kualitas. - Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran berdasarkan PMK 214 tahun 2017 yang dipublikasikan menggunakan Aplikasi Online SMART DJA
Bukti realisasi/ pemenuhan IKSK	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Maluku yang tercantum dalam SMART/Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja sesuai PMK yang berlaku
Formula/Cara menghitung	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran secara otomatis akan dihitung dalam aplikasi SMART yang dibuat DJA Kemenkeu
Klasifikasi target	Maximize
Sumber data	Aplikasi SMART
Cara pengambilan data	Mengentry rencana penarikan, capaian output dan kendala pencapaian output Balai Penerapan Modernisasi Pertanian..... pada aplikasi SMART, sehingga akan keluar nilai kinerja secara otomatis dari aplikasi tersebut
Catatan khusus	1. $90\% > NK \leq 100\%$ dikategorikan Sangat Baik 2. $80\% > NK \leq 90\%$ dikategorikan Baik 3. $60\% > NK \leq 80\%$ dikategorikan Cukup atau Normal 4. $50\% > NK \leq 60\%$ dikategorikan Kurang $NK \leq 50\%$ dikategorikan Sangat Kurang
Pihak yang melaku-kan pengukuran IKSK/sumber IKSK	Kemenkeu

Activate Windows

Lampiran 6. Rencana Aksi Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Maluku Tahun 2025

RENCANA AKSI TAHUN ANGGARAN 2025 BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN										
							TW1	TW2	TW3	TW4
SS02	Komoditas Pertanian Yang Bermilai Tambah dan Berdaya Saing	IKS S0202	02 - Nilai Ekspor untuk Produk Pertanian Nasional		35,00	%				
SP01	Meningkatnya sertifikasi Usahatani Nasional	IKSP0101	Persentase usaha tani berbadan hukum yang tersertifikasi		20,52	%	0	0	50	100
Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Maluku										
SK01	Meningkatnya pelaku usaha tani yang menerapkan standar pertanian	IKK1	Jumlah usahatani yang mendapatkan pendampingan penerapan standar pertanian (Jumlah Usahatani)							
		7911.AEF.109	Standar Instrumen pertanian yang didiseminasikan	97.528.000	244	Orang	0	0	55	100
SK02	Tersedianya teknologi hasil perakayasaan dan	IKK2	Jumlah produksi benih/ bibit sumber spesifik lokasi (unit)							
SK03	Terwujudnya Birokraal Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	IKK4	Nilai Pembangunan zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Maluku (Nilai)							
		6918.AEA.101.051.A	Pendampingan Program Strategis Kementerian	982.000.000	1	Kegiatan	10	45	75	100
		6918.EBA.956.051.A	Pelaksanaan Pengelolaan BMN	10.000.000	1	Layanan	25	45	70	100
		6918.EBA.958.051.A	Pengelolaan Informasi Publik	15.000.000	1	Layanan	10	50	75	100
		6918.EBA.958.051.E	Layanan Penerapan SIP dan Pengelolaan Produk Hasil Standardisasi	20.000.000	1	Layanan	10	45	70	100
		6918.EBA.958.051.F	Layanan Kepegawalan	20.000.000	1	Layanan	10	45	70	100
		6918.EBA.958.051.H	Layanan Ketatausahaan, Kearsipan, Rumah Tangga dan Perengklapan	20.000.000	1	Layanan	12	55	75	100
		6918.EBA.958.051.J	Sinkronisasi Kegiatan	30.000.000	1	Layanan	15	55	70	100
		6918.EBA.994.001.A	Pembayaran Gaji dan Tunjangan	3.165.658.000	1	Layanan	25	50	75	100
		6918.EBA.994.002.A	Pembayaran Terkait Pelaksanaan Operasional Kantor	28.800.000	1	Layanan	25	50	75	100
		6918.EBA.994.002.B	Pemeliharaan Kantor	781.898.000	1	Layanan	25	50	75	100
		6918.EBA.994.002.C	Langganan Daya dan Jasa	264.000.000	1	Layanan	25	50	75	100
		6918.EBA.994.002.D	Kebutuhan Sehari-Hari Perkantoran	942.502.000	1	Layanan	25	50	75	100
SK03	Terwujudnya Birokraal Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	IKK4	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran pada Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Maluku (Nilai)							
		6918.EBA.962.051.A	Penyusunan Program dan Anggaran	35.000.000	1	Layanan	20	45	65	100
		6918.EBA.962.051.G	Layanan Keuangan	20.000.000	1	Layanan	20	45	65	100
		6918.EBO.953.051.A	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	35.000.000	1	Layanan	0	25	55	100
		6918.EBO.958.051.A	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	23.702.000	1	Layanan				

Lampiran 7. Dokumentasi Kegiatan Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Maluku Tahun 2025

a. Diseminasi Standar Instrumen Pertanian



b. Pendampingan Program Strategis Kementerian Pertanian



